



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
**BALAI BESAR PENGEMBANGAN KOMPETENSI
APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI II**

Jalan Kiara Payung Km. 4,5 Jatinangor-Sumedang, Telepon (022) 87835007, Faksimile (022) 87835008
Laman www.ppsdmregbandung.kemendagri.go.id, Pos-el ppsdm.regbandung@kemendagri.go.id

6 Januari 2026

Nomor : 800.2.4.1/068/BBPKA-PDN II
Sifat : Penting
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Penawaran Program Diklat Teknis Umum dan Substantif Tahun 2026

Yth. 1. Para Sekretaris Daerah Provinsi; dan
2. Para Sekretaris Daerah Kabupaten/ Kota.

Disampaikan dengan hormat, dalam rangka upaya Pengembangan Kompetensi ASN agar tetap relevan dengan tuntutan organisasi sebagaimana amanat dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN serta sebagai upaya pembinaan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai amanat Pasal 233 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, BBPKA-PDN II yang merupakan Lembaga Diklat Pemerintah Terakreditasi dan sebagai Unit Pelaksana Teknis dari BPSDM Kemendagri akan menyelenggarakan berbagai Diklat Teknis Umum dan Substantif dengan metode Klasikal yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota Tahun 2025 dengan pola pendanaan PNPB (kontribusi).

Sehubungan dengan itu, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Diklat Teknis Umum dan Substantif yang kami tawarkan **terlampir** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat ini.
2. Penyelenggaraan Diklat Teknis Umum dan Substantif bertempat di Luar Kantor BBPKA-PDN II - BPSDM Kemendagri/ hotel (waktu penyelenggaraan tentatif ketika jumlah kuota minimal Peserta telah terpenuhi).
3. Tenaga Pengajar/ Narasumber adalah Pejabat Manajerial dan Non-Manajerial di lingkungan Kemendagri serta pakar/ praktisi lainnya yang kompeten dan ahli di bidang serta pengalamannya.
4. Tarif penyelenggaraan Diklat Teknis Umum dan Substantif bagi Tingkat Pejabat Strategis sesuai yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNPB yang Berlaku pada Kemendagri (belum termasuk biaya akomodasi dan konsumsi) yang disetorkan melalui Bendahara Penerimaan BBPKA-PDN II - BPSDM Kemendagri paling lambat 1 (satu) minggu sebelum penyelenggaraan.
5. Biaya dimaksud dapat disetorkan lewat bank terdekat kepada Kas Negara melalui nomor Kode *Billing* setelah dibuatkan oleh Bendahara Penerimaan BBPKA-PDN II - BPSDM Kemendagri (*contact person* konfirmasi dari Bendahara Penerimaan a.n. Sdri. Dini Indrianti Fazrin, S.Si, M.AB HP. 0821-1560-1313).
6. Biaya mengikuti Diklat Teknis Umum dan Substantif dimaksud apabila terjadi sesuatu atau lain hal (Peserta mengundurkan diri) tidak dapat ditarik kembali. Serta hanya Peserta yang telah menyetorkan biaya penyelenggaraan yang dapat mengikuti Diklat Teknis Umum dan Substantif ini.

7. Untuk biaya akomodasi (penginapan dengan ketentuan 1 kamar untuk 2 orang dan penggunaan ruang pertemuan) serta konsumsi (3 kali makan dan 2 kali *snack*) diserahkan langsung kepada pihak penyedia jasa/ manajemen hotel yang akan disampaikan lebih lanjut pada Surat Pemanggilan Peserta.
8. Biaya transportasi dan uang saku Peserta selama mengikuti Diklat Teknis Umum dan Substantif ditanggung oleh Instansi Pengirim Peserta.
9. Diharapkan kepada Instansi Pengirim dapat segera mengusulkan Daftar Nama Calon Peserta untuk mengikuti Diklat Teknis Umum dan Substantif dimaksud sebelum penyelenggaraan melalui Narahubung kami.
10. Calon Peserta Diklat Teknis Umum dan Substantif yang memenuhi persyaratan akan dipanggil melalui Surat Pemanggilan Calon Peserta selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum penyelenggaraan.

BBPKA-PDN II - BPSDM Kemendagri mengajak para Sekretaris Daerah Provinsi dan Sekretaris Daerah Kabupaten/ Kota agar dapat bekerja sama dalam hal penyelenggaraan/ pengiriman Peserta Diklat Teknis Umum dan Substantif dimaksud. Untuk informasi lebih lanjut terkait teknis penyelenggaraan serta hal-hal lainnya dapat menghubungi Narahubung kami a.n. Sdri. Maity Rubiyanti, S.IP, M.AP (*Contact Person* 0813-9460-3333).

Demikian atas kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Kepala,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala
Dr. Indra Maulana Syamsul Arief, S.Kom, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/ b)
NIP. 198301042008121001

Tembusan:

1. Kepala BPSDM Provinsi;
2. Kepala BKD Provinsi; dan
3. Kepala BKPSDM Kabupaten/ Kota.



Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRé sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.

Lampiran Surat Dinas
Nomor : 800.2.4.1/068/BBPKA-PDN II
Tanggal : 6 Januari 2026

DAFTAR DIKLAT TEKNIS UMUM DAN SUBSTANTIF TAHUN 2026 PADA BBPKA-PDN II - BPSDM KEMENDAGRI

No.	Program (Hari)	Target Peserta	Rencana Penyelenggaraan	Tarif Penyelenggaraan Per Peserta
1.	Diklat Keprotokolan (Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pedoman Keprotokolan di Lingkungan Kemendagri dan Pemerintahan Daerah) (5 hari)	ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota	23 s.d. 27 Februari 2026	Rp 3.025.000,-
2.	Diklat Tata Naskah Dinas (Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah) (5 hari)	ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota	23 s.d. 27 Februari 2026	Rp 3.025.000,-
3.	Diklat Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Anjab - ABK) di Lingkungan Pemerintah Daerah (5 hari)	ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota	2 s.d. 6 Maret 2026	Rp 3.025.000,-

No.	Program (Hari)	Target Peserta	Rencana Penyelenggaraan	Tarif Penyelenggaraan Per Peserta
4.	Diklat Penyusunan Rencana Pengembangan Kompetensi Jangka Menengah Daerah (RPK - JMD) (5 hari)	ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota	2 s.d. 6 Maret 2026	Rp 3.025.000,-
5.	Diklat Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) (5 hari)	ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota	6 s.d. 10 April 2026	Rp 3.025.000,-
6.	Diklat Pengelolaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD - RI) (5 hari)	ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota	6 s.d. 10 April 2026	Rp 3.025.000,-
7.	Diklat Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (5 hari)	ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota	13 s.d. 17 April 2026	Rp 3.025.000,-
8.	Diklat Penilaian Aset Daerah (5 hari)	ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota	13 s.d. 17 April 2026	Rp 3.025.000,-
9.	Diklat Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (5 hari)	ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota	20 s.d. 24 April 2026	Rp 3.025.000,-

No.	Program (Hari)	Target Peserta	Rencana Penyelenggaraan	Tarif Penyelenggaraan Per Peserta
10.	Diklat Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) (5 hari)	ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota	20 s.d. 24 April 2026	Rp 3.025.000,-
11.	Diklat Penyusunan LPPD (5 hari)	ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota	4 s.d. 8 Mei 2026	Rp 3.025.000,-
12.	Diklat Teknis Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) (5 hari)	ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota	4 s.d. 8 Mei 2026	Rp 3.025.000,-
13.	Diklat Teknis Standar Pelayanan Publik (5 hari)	ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota	18 s.d. 22 Mei 2026	Rp 3.025.000,-
14.	Diklat Manajemen Kinerja (5 hari)	ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota	18 s.d. 22 Mei 2026	Rp 3.025.000,-
15.	Diklat Manajemen Talenta (5 hari)	ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota	8 s.d. 12 Juni 2026	Rp 3.025.000,-

No.	Program (Hari)	Target Peserta	Rencana Penyelenggaraan	Tarif Penyelenggaraan Per Peserta
16.	Diklat Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah (5 hari)	ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota	8 s.d. 12 Juni 2026	Rp 3.025.000,-
17.	Diklat Pemeriksaan Pajak Daerah (5 hari)	ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota	22 s.d. 26 Juni 2026	Rp 3.025.000,-
18.	Diklat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah (5 hari)	ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota	22 s.d. 26 Juni 2026	Rp 3.025.000,-
19.	Diklat Tata Cara Penghapusan Aset Daerah (5 hari)	ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota	29 Juni s.d. 3 Juli 2026	Rp 3.025.000,-
20.	Diklat Penguatan Tugas dan Fungsi Sekretaris Perangkat Daerah (5 hari)	Sekretaris Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota	29 Juni s.d. 3 Juli 2026	Rp 3.025.000,-
21.	Diklat Manajemen Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Daerah (5 hari)	ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota	6 s.d. 10 Juli 2026	Rp 3.025.000,-

No.	Program (Hari)	Target Peserta	Rencana Penyelenggaraan	Tarif Penyelenggaraan Per Peserta
22.	Diklat Manajemen Kepegawaian (5 hari)	ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota	6 s.d. 10 Juli 2026	Rp 3.025.000,-
23.	Diklat Peningkatan Kapasitas Bagi Pengelola Humas dan Media Sosial di Lingkungan Pemerintah Daerah (5 hari)	ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota	13 s.d. 17 Juli 2026	Rp 3.025.000,-
24.	Diklat Penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah (5 hari)	ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota	13 s.d. 17 Juli 2026	Rp 3.025.000,-
25.	Diklat Penyusunan RKA-SKPD Berbasis SIPD (5 hari)	ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota	20 s.d. 24 Juli 2026	Rp 3.025.000,-
26.	Diklat Penyusunan Karya Tulis Ilmiah (KTI) (5 hari)	ASN di Lingkungan K/L, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota	20 s.d. 24 Juli 2026	Rp 3.025.000,-
27.	Diklat Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) (5 hari)	ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota	27 s.d. 31 Juli 2026	Rp 3.025.000,-

No.	Program (Hari)	Target Peserta	Rencana Penyelenggaraan	Tarif Penyelenggaraan Per Peserta
28.	Diklat Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (5 hari)	ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota	27 s.d. 31 Juli 2026	Rp 3.025.000,-

Kepala,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala
Dr. Indra Maulana Syamsul Arief, S.Kom, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/ b)
NIP. 198301042008121001